

SKRIPSI



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN
KALIABANG TENGAH KOTA BEKASI**

Disusun Oleh :

NAMA : NADIA RAHMI DEWI

NPM : 2012011003

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, TAHUN 2024



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN
KALIABANG TENGAH KOTA BEKASI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan**

Oleh

**NAMA : NADIA RAHMI DEWI
NPM : 2012011003
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
JAKARTA, TAHUN 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI**

NAMA : NADIA RAHMI DEWI
NPM : 2012011003
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI : KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DI
KELURAHAN KALIABANG TENGAH
KOTA BEKASI

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada 08 Mei 2024

Pembimbing



(Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd)

LEMBAR PENGESAHAN

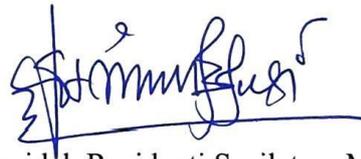
Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 17 Mei 2024

Ketua merangkap Anggota



(Ratri Istania, S.IP., MA., Ph.D.)

Sekretaris merangkap Anggota



(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM.)

Anggota



(Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd)

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nadia Rahmi Dewi

NPM : 2012011003

Jurusan : Administrasi Pembangunan Negara

Program Studi : Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN KALIABANG TENGAH KOTA BEKASI** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat atau penjiplakan** terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia **menerima sanksi** berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 08 Mei 2024

Penulis,



(Nadia Rahmi Dewi)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi”. Terima Kasih kepada Bapak **Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir di Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam proses skripsi ini.

Kegiatan skripsi merupakan salah satu syarat wajib yang harus diselesaikan dalam Program Studi Administrasi Pembangunan Negara di Politeknik STIA LAN Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA. Selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
2. Ibu Nila Kurniawati, SAP., MAP. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara
3. Bapak Alih Aji Nugroho, S.AP., MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan dan membimbing saya.
4. Bapak H. Ahmad Hidayat, S.Ag selaku lurah di Kelurahan Kaliabang Tengah yang telah memberikan izin untuk menjalankan penelitian dilapangan.
5. Bapak Ahmad Mansuri selaku staff sekretariat yang telah memberikan saya izin untuk bisa menjalankan penelitian di Kelurahan Kaliabang Tengah.
6. Para Staf Kelurahan Kaliabang Tengah yang telah membantu membimbing saya selama berlangsungnya proses pelaksanaan penelitian dan sudah memberikan ilmu serta wawasan.
7. Kepada kedua orang tua saya (Ibu Sri Supeni dan Bapak Muhammad) yang selalu memberikan semangat, motivasi , doa dan juga dukungan.

8. Kepada ketiga saudara saya Rina, Aulia dan Rafi yang telah memberikan dukungan dan juga semangat.
9. Kepada M. Raihandi yang sudah memberikan dukungan dan juga semangat selama proses skripsi hingga selesai.
10. Kepada teman kelas “anak soleh dan solaha umi abi” yang telah memberikan dukungan dan berjuang bersama pada semester akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Namun demikian penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 01 Mei 2024

NRD

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Nadia Rahmi dewi (2012011003)

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi

Skripsi, xiv, hlm.120

Dosen Pembimbing: Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd

Meningkatnya permintaan layanan pembuatan dokumen kependudukan mengakibatkan kekurangan stok blangko KTP-el di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Menanggapi permasalahan tersebut Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membuat sebuah inovasi baru. Inovasi tersebut diperkenalkan dengan nama Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah belum sepenuhnya efektif. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, sosialisasi yang kurang maksimal, ketidaksesuaian antara harapan, dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi permasalahan diatas maka rekomendasi dari penelitian ini adalah memperkuat integrasi IKD dengan berbagai layanan publik, penambahan operator di Kelurahan Kaliabang Tengah, menyediakan Wi-Fi gratis, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan monitoring evaluasi secara berkala terhadap kinerja pelaksana di lapangan, mendorong kolaborasi yang baik antar operator, dan meningkatkan sosialisasi di Kelurahan Kaliabang Tengah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital, Van Meter dan Van Horn

ABSTRACT

Nadia Rahmi dewi (2012011003)

Implementation of Digital Population Identity of Central Kaliabang Village, Bekasi City

Undergraduate Thesis, xiv, hlm.120

Supervisor: Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd

The increasing demand for population document creation services has resulted in a shortage of stock of e-KTP forms in all regions in Indonesia. Responding to this problem, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia created a new innovation. This innovation was introduced under the name Digital Population Identity (IKD) which is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software and Electronic Identity Card Forms and Implementation of Digital Population Identity. The aim of this research is to determine the implementation of the IKD policy in Kaliabang Tengah Subdistrict, Bekasi City. The theory used in this research is the policy implementation model developed by Van Metter and Van Horn. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used include documentation studies, interviews and observations. The results of this research show that the implementation of the IKD policy in Central Kaliabang Subdistrict has not been fully effective. This is because there are several obstacles such as low community participation, less than optimal socialization, mismatch between expectations, and limited resources. To overcome the above problems, the recommendations from this research are to strengthen the integration of IKD with various public services, add operators in Central Kaliabang Subdistrict, provide free Wi-Fi, improve facilities and infrastructure, carry out regular monitoring and evaluation of the performance of implementers in the field, encourage good collaboration. both between operators, and increasing socialization in Central Kaliabang Village.

Keywords: *Policy Implementation, Digital Population Identity, Van Meter and Van Horn*

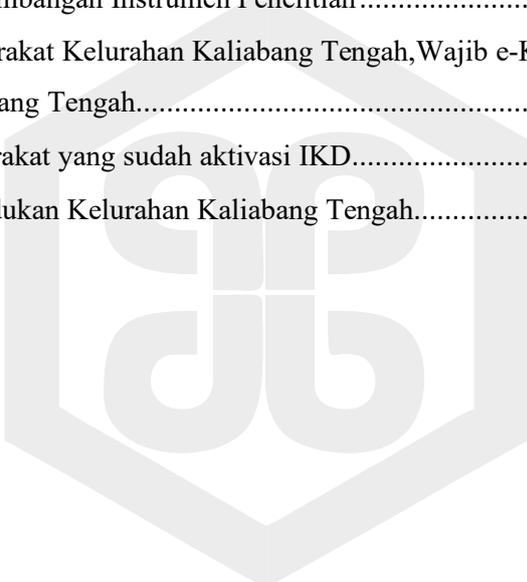
DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR FOTO	xiv
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Kebijakan dan Teori.....	11
1. Tinjauan Kebijakan	11
2. Tinjauan Teori.....	14
a. Pengertian Kebijakan Publik	14
B. Konsep Kunci.....	33
C. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian.....	37
B. Teknik Pengumpulan Data.....	38
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Penyajian Data	48
B. Analisis Dan Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan Penelitian	90
D. Sintesis Masalah.....	109
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	
1. Pedoman Telaah Dokumen	
2. Pedoman Wawancara	
3. Pedoman Observasi	
4. Hasil Telaah Dokumen	
5. Hasil Wawancara	
6. Hasil Observasi	
7. Surat Penelitian Dari Politeknik STIA Lan Jakarta	
8. Surat Balasan Dari Pemerintahan Kelurahan Kaliabang Tengah	
9. Surat Balasan Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi	
10. Surat Selesai Penelitian dari Pemerintahan Kelurahan Kaliabang Tengah	
11. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme	
12. Daftar Riwayat Hidup Peneliti	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Key Informant.....	40
Tabel 3. 2 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian.....	44
Tabel 4. 1 Jumlah Masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah, Wajib e-KTP, dan Aktivasi IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah.....	63
Tabel 4. 2 Jumlah masyarakat yang sudah aktivasi IKD.....	64
Tabel 4. 3 Data kependudukan Kelurahan Kaliabang Tengah.....	94



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Kebijakan.....	16
Gambar 2. 2 A Model of The Policy Implementation Process	22
Gambar 2. 3 Model Implementasi Kebijakan.....	25
Gambar 2. 4 Model Implementasi Kebijakan Edward III	27
Gambar 2. 5 Kerangka Berpikir.....	36
Gambar 4. 1 Struktur organisasi di Kelurahan Kaliabang Tengah	50
Gambar 4. 2 Pengajuan pertanyaan oleh warga.....	61
Gambar 4. 3 Berikut adalah SOP Dinas Dukcapil terkait aktivasi IKD.....	73
Gambar 4. 4 Sosialisasi IKD pada Instagram Kelurahan Kaliabang Tengah	81
Gambar 4. 5 SOP Aktivasi IKD Dinas Dukcapil Kota Bekasi	101

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR FOTO

- Foto 4. 1 Sarana dan prasana ruang operator di Kelurahan Kaliabang Tengah.....71
Foto 4. 2 Masyarakat Sedang Melakukan Aktivasi IKD.....84



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sehari-hari individu di Indonesia. Di era pesatnya teknologi informasi, penguasaan teknologi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting, hal ini dikarenakan teknologi digital memberikan kemudahan akses dan ketersediaan beragam informasi yang kita butuhkan. Di dunia digital, terdapat berbagai macam cara untuk mengakses informasi melalui internet, sehingga informasi apapun dapat ditemukan dengan mudah. Selain berfungsi sebagai sumber informasi, internet juga menyediakan transaksi secara online. Sistem elektronik berguna untuk menyampaikan informasi berbasis pada jaringan elektronik dan telekomunikasi. Sistem tersebut bertujuan untuk menyediakan, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mempublikasikan, mengirimkan informasi secara elektronik. Pesatnya kemajuan teknologi tidak hanya berdampak pada masyarakat saja, namun juga berdampak pada pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi pada seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan berbasis teknologi dalam rangka memajukan kualitas pelayanan publik. Layanan digital dari suatu lembaga pemerintah menyimpan berbagai informasi yang luas dengan penggunaan layanan, baik untuk penyedia layanan maupun peningkatan kualitas layanan (Nurhakim, 2014: 404). Penggunaan layanan publik bukan hanya terbatas pada sektor pelayanan publik, akan tetapi juga merambah kepada pemerintahan, industri keamanan negara dan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir semua proses dapat dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi yang pesat. Penggunaan teknologi yang tepat dan efisien dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sementara teknologi yang kurang tepat dan efisien dapat menyebabkan biaya produktivitas yang tinggi. Dalam sebuah lembaga pemerintahan yang berfokus pada kesejahteraan

masyarakat, pelayanan publik merupakan salah satu aspek yang sangat penting, karena pelayanan publik menjadi fokus utama dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Pelayanan publik memiliki berbagai macam jenis layanan baik yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Suryantoro & Kusdyana, 2020: 224). Salah satu layanan publik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan adalah administrasi kependudukan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa lembaga pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang untuk memberikan pelayanan kepada setiap penduduk Indonesia yang berkaitan dengan pelaporan peristiwa penting kependudukan.

Kelurahan Kaliabang Tengah merupakan salah satu Kelurahan di Kota Bekasi yang melaksanakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan yang diberikan oleh Kelurahan Kaliabang Tengah meliputi pembuatan surat domisili penduduk, surat keterangan pindah penduduk, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sudah menikah, surat keterangan tidak mampu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Salah satu jenis pelayanan yang sering diakses oleh masyarakat adalah KTP. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 point (14), dijelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau disingkat dengan KTP-el, adalah kartu identitas resmi yang dilengkapi chip dan diterbitkan oleh instansi pelaksana. UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 63 ayat (1) menegaskan bahwa penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik (KTP-el).

KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memiliki sistem keamanan yang baik, baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi yang berbasis pada database kependudukan nasional. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan satu identitas tunggal bagi setiap penduduk dengan menggunakan kode keamanan dan rekaman data elektronik data kependudukan yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan Nasional. Oleh karena itu, pada tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait penerapan KTP-el. Dengan pertumbuhan yang terus berkembang jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan tata kelola administrasi yang lebih teratur di berbagai sektor layanan publik, pelayanan dokumen kependudukan menjadi isu penting yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan terhadap layanan pembuatan dokumen kependudukan. Faktanya, masih banyak masyarakat di Kelurahan Kaliabang Tengah yang belum melakukan perekaman KTP-el. Kurangnya stok blangko KTP-el menjadi penyebabnya, sehingga masyarakat yang mengajukan harus menunggu sampai stok tersedia kembali untuk mendapatkan ktp fisik dan sementara diberi suket. Hal ini didukung oleh data pra penelitian yang dimana Permintaan pencetakan KTP-el per hari (55 jiwa) lebih tinggi daripada jumlah blangko yang dicetak per hari (35 jiwa), Stok blangko yang disediakan oleh Disdukcapil Kota Bekasi (350 keping) setiap bulannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Kaliabang Tengah mengalami kekurangan blangko KTP-el yang berakibat pada keterlambatan penerbitan KTP fisik. Masalah kelangkaan blangko KTP-el tidak hanya terjadi di beberapa wilayah maupun Kelurahan Kaliabang Tengah saja, tetapi juga merata di seluruh daerah Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan penting, sehingga pemerintah berperan penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang pesat. Banyak keluhan dari masyarakat mengenai keterlambatan pencetakan KTP-el, padahal dokumen fisik seperti KTP-el masih menjadi syarat penting dalam mendukung pelayanan publik.

Mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan suatu inovasi baru dengan memanfaatkan teknologi. Inovasi yang berbeda dengan sebelumnya dapat memberikan manfaat yang berbeda dengan solusi yang ada. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 terkait pedoman inovasi pelayanan publik pasal I menyatakan bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Maksud dari penjelasan tersebut adalah pentingnya langkah-langkah yang nyata untuk mengembangkan suatu inovasi dalam pelayanan publik baik di level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kecepatan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya meningkatkan dan memperbaiki kualitas suatu layanan publik dengan menggunakan teknologi dan pendekatan baru adalah suatu komitmen yang dapat diambil oleh pemerintah untuk membuat pelayanan tersebut menjadi lebih efektif.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah menciptakan sebuah terobosan baru, seperti peralihan sistem kerja konvensional ke digital. Tujuan utama digitalisasi ini adalah untuk mempermudah layanan publik, mempersingkat waktu proses layanan publik dan juga mencegah terjadinya KKN. Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil membuat sebuah terobosan baru untuk mengatasi permasalahan terkait kelangkaan blangko KTP-el, inovasi tersebut diperkenalkan dengan nama Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau yang biasa disebut dengan KTP digital. IKD diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 pada pasal 1 poin (18) menjelaskan IKD sebagai berikut:

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Saat ini IKD sedang di kampanyekan diseluruh Disdukcapil yang berada di seluruh Indonesia. IKD dapat diakses melalui aplikasi yang tersedia

di Android maupun IOS. Masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKD di *playstore* untuk android sedangkan untuk IOS dapat diunduh melalui *Appstore*. IKD diperkenalkan dan diuji coba terlebih dahulu kepada staf Dinas Dukcapil (Putra, 2023: 335). Pada tahap uji coba melibatkan petugas Dukcapil bukan hanya memberikan pengalaman langsung mengenai kekurangan maupun kelebihan sistem IKD yang saat ini sedang tahap pengembangan. Namun juga dapat membantu untuk mengidentifikasi permasalahan terkait, operasional, teknis ataupun kebijakan yang muncul pada saat IKD dilaksanakan. Pandangan dari petugas Disdukcapil, dapat mengamati bagaimana kesiapan sistem pada IKD, bagaimana pelatihan yang dibutuhkan bagi pelaksana, dan juga apakah memerlukan perubahan suatu prosedur yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan IKD. Hal tersebut bertujuan agar dapat melakukan perbaikan pada masalah selama IKD di uji coba, sebelum penerapan dan disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, digitalisasi meminimalkan risiko kerusakan dan penyalahgunaan dokumen. Dengan maraknya penyalahgunaan data, kebocoran data, dan peretasan akun, pemerintah merespon dengan meluncurkan IKD.

IKD berfungsi untuk melindungi data pribadi dan juga menjadi alternatif dokumen fisik karena IKD ini dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih untuk menjaga privasi penggunanya. Memiliki fitur pencegahan tanggap layar, Kode QR yang dibagikan juga akan selalu berubah dan hanya berlaku 90 detik. Setelah waktu tertentu kode QR tersebut sudah tidak aktif dan hanya dapat dipindai satu kali, hal ini dapat meminimalisir penyalahgunaan informasi. IKD atau yang biasa disebut dengan KTP Digital adalah suatu perubahan dokumen dari bentuk fisik menjadi digital. Selain KTP digital, dalam IKD juga terdapat Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya dalam bentuk digital. Pada aplikasi IKD terdiri dari berbagai macam fitur seperti KTP digital, Kartu keluarga, Dokumen Kependudukan dan tanda tangan elektronik. Selain itu IKD juga terhubung dengan beberapa dokumen penting seperti BPJS, NPWP, surat vaksin dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk

memudahkan transaksi. Tujuan dari adanya IKD salah satunya adalah untuk mempermudah transaksi sektor publik maupun privat dengan mengurangi kebutuhan masyarakat akan fotokopi saat melakukan suatu pelayanan karena dapat diakses dan diverifikasi secara elektronik melalui aplikasi tersebut. Menurut data dari Dirjen Dukcapil, implementasi IKD berhasil menghemat anggaran pemerintah sebesar 50 hingga 100 miliar rupiah per tahun untuk pengadaan blangko KTP elektronik (Permadi & Rokhman, 2023: 83).

Peneliti menyertakan beberapa artikel yang relevan dari penelitian sebelumnya, diharapkan dapat menjadi referensi dan mendukung dalam penyusunan penelitian ini.

Pertama, Firmansyah & Anisykurlillah (2023) yang berjudul "Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya." Penelitian terdahulu bertujuan mengevaluasi efektivitas program IKD di Kelurahan Kandangan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian terdahulu menggunakan Teori Efektivitas dari Budiani (2007). Dalam teori tersebut mencakup ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Penelitian ini membahas implementasi IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, sementara penelitian terdahulu tersebut membahas efektivitas program IKD di Kelurahan Kandangan, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn untuk analisis lebih mendalam, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori efektivitas menurut Budiani (2007). Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas IKD dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah program IKD di Kelurahan Kandangan sudah cukup efektif, memudahkan dan mempercepat pelayanan kependudukan. Meskipun mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan keterbatasan sarana, jumlah pengguna IKD terus meningkat. Sosialisasi dan pemantauan yang

berkelanjutan terus dilakukan untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan program ini di kalangan masyarakat.

Kedua, Putra (2023) yang berjudul “Inovasi Pelayanan E-Ktp Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang”. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk mengidentifikasi inovasi pelayanan E-KTP melalui aplikasi IKD dan faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat penggunaan aplikasi IKD. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, sementara penelitian terdahulu membahas inovasi pelayanan E-KTP berbasis aplikasi IKD di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn untuk analisis lebih mendalam, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori inovasi dari Rogers, yang mencakup *variabel Relative Advantage* (keuntungan relatif), *Compability* (kesesuaian), *Complexity* (kerumitan), *Triability* (kemungkinan dicoba), dan *Observability* (kemudahan diamati). Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas IKD dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inovasi pelayanan E-KTP melalui Aplikasi IKD di Kota Tangerang sudah dirasakan oleh masyarakat, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Faktor penghambat inovasi ini adalah belum terintegrasinya aplikasi IKD dengan beberapa instansi karena keterbatasan perangkat dan kurangnya sosialisasi.

Ketiga, Aprillia, (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan pelayanan E-KTP dilakukan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

Metode yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini fokus pada Implementasi Kebijakan IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Kedua penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang sama yaitu deskriptif, selain itu juga menggunakan teori yang sama, yaitu Teori Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa

Pelayanan E-KTP di Kecamatan Majalaya sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan. Standar dan sasaran kebijakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun terdapat kekurangan sumber daya manusia terutama PNS. Fasilitas sudah cukup lengkap, namun perlu dioptimalikan. Komunikasi internal dan eksternal sudah berjalan dengan baik, namun sosialisasi ke masyarakat, khususnya di daerah pedalaman, masih kurang. Struktur organisasi sudah terstruktur, dan prosedur berjalan sesuai SOP, Kondisi sosial, politik, dan ekonomi cukup mempengaruhi proses kebijakan.

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memahami secara menyeluruh terkait Kebijakan IKD. Dengan merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis berjudul "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi." adalah bahwa sama-sama membahas tentang IKD. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada Implementasi Kebijakan IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah, sedangkan penelitian terdahulu lebih menyoroti efektivitas dan inovasi terkait IKD. Selain itu, terdapat perbedaan dalam teori yang digunakan, dimana

penelitian terdahulu menggunakan teori inovasi dan efektivitas, sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi dengan menggunakan metode kualitatif.

Kelurahan Kaliabang Tengah merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara, yang dapat melakukan aktivasi IKD. Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki masyarakat yang heterogen tentunya juga akan memiliki pengalaman maupun pandangan yang berbeda terhadap IKD. Pandangan masyarakat yang beragam dapat memberikan gambaran tentang bagaimana IKD diterapkan di Kelurahan Kaliabang Tengah. Dengan memahami hal ini, penyelenggara layanan dapat mengidentifikasi bagaimana mengoptimalkan pelayanan tersebut. Maka dari itu, dengan memahami dan merespon beragam pandangan masyarakat, diharapkan pelaksanaan IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata kepada seluruh masyarakat Kelurahan Kaliabang Tengah. peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan karena itu, peneliti memilih judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KELURAHAN KALIABANG TENGAH KOTA BEKASI."**

B. Rumusan Permasalahan

Bagaimana Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Kaliabang Tengah Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan harapan dapat memberikan manfaat yang baik bagi akademis dan juga praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang pemahaman teori dan literatur mengenai Implementasi Kebijakan IKD, khususnya implementasi di tingkat Kelurahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, memberikan pemahaman secara mendalam tentang penerapan IKD di tingkat Kelurahan dan meningkatkan keterampilan dalam mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat terkait penerapan IKD di Kelurahan Kaliabang Tengah.
- b. Bagi Politeknik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian- penelitian selanjutnya terkait IKD
- c. Bagi Instansi, penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan hasil untuk menjadi bahan masukan positif dan saran untuk mengoptimalkan kebijakan IKD.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A